



Peningkatan Pemasaran Pentingnya Legalitas Lengkap Dan Higienitas Produk Krupuk Pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Increased Marketing Importance of Complete Legality and Hygiene of Crustacean Products in Small and Medium-sized Micro-Enterprises

Hakkun Elmunsyah^{1*}, Anik Nur Handayani², Arya Kusumawardana³, Sujito⁴, Lavinsky Novan Insaghi⁵, Abdullah Iskandar Syah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Malang, Jawa Timur

Korespodensi penulis: hakkun@um.ac.id¹

Article History:

Received: 20 Juli 2023

Revised: 22 Agustus 2023

Accepted: 26 September 2023

Keywords:

Legality of Licensing, Marketing, Business, Information Technology Systems, MSMEs

Abstract: *This community service is located in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency. The problem faced by partners is the lack of a guarantee of business legality. The next problem is product packaging and labels that are less attractive and do not meet standards, which make it difficult to market products. Solutions that can be proposed with training and assistance to obtain a business license or business legality certificate are in the form of business identification numbers (NIB), home industry food production certificates (SPP-IRT), labels and brands, and product halal guarantees. There is training and assistance in making product packaging and labels, considering that packaging is a very important factor for maintaining quality and attracting customers to buy products when they are marketed. In addition, training and assistance for entrepreneurs in using information technology to market products to a wider market online and offline.*

Abstrak

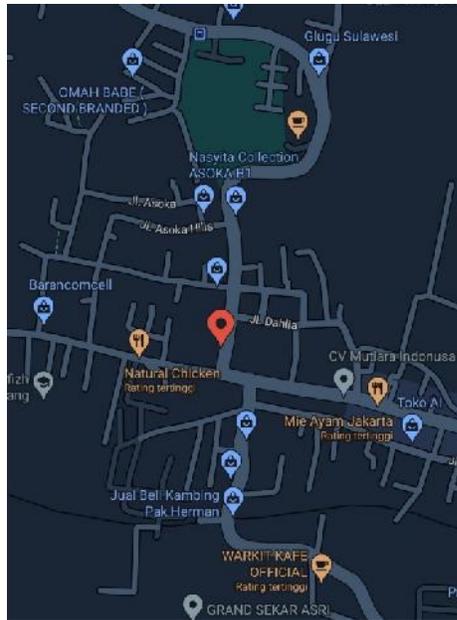
Pengabdian kepada masyarakat ini terletak di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya jaminan legalitas usaha. Masalah berikutnya adalah kemasan dan label produk yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pemasaran produk. Solusi yang dapat diajukan dengan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan izin usaha atau sertifikat legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), label/merek, dan jaminan halal produk. Terdapat pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kemasan dan label produk, mengingat kemasan merupakan salah satu faktor sangat penting untuk menjaga kualitas dan menarik pelanggan untuk membeli produk saat dipasarkan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi para pengusaha dalam menggunakan teknologi informasi untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih luas secara online dan offline.

Kata Kunci: Legalitas Perijinan, Pemasaran, Usaha, Sistem Teknologi Informasi, UMKM

*Hakkun Elmunsyah, hakkun@um.ac.id

PENDAHULUAN

Peran pelaku usaha di Indonesia cukup besar untuk menopang perekonomian negara. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang ekonomi negeri.¹ UMKM sering kali mengalami kendala dalam melakukan usaha salah satunya adalah tentang perizinan berusaha. Hal ini harus diperhatikan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan perekonomian negara. Pengabdian kepada masyarakat ini terletak di Jalan Mulyodadi No. 58 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Desa Mulyoagung memiliki luas 396.593 Ha yang memiliki 5 Dukuh, 20 RW, dan 66 RT.



Gambar 1. Peta Lokasi Pelaku Usaha

Hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mulyoagung banyak bekerja dalam dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Desa Mulyoagung sebesar 49% warganya merupakan pelaku usaha. Usaha tersebut tidak berkembang secara optimal karena terdapat faktor-faktor penunjang usaha terutama dalam hal perizinan dan pemasaran yang belum dipahami oleh pelaku usaha.²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Mulyoagung dan ketua komunitas UMKM Dau, mitra memiliki beberapa masalah, yaitu:

1. Legalitas Usaha/Bisnis

Produk yang telah diproduksi tidak memiliki legalitas komersial, baik Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Merek/Logo, maupun Sertifikat Jaminan Halal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh tim pengabdian, para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengajukan legalitas perjanjian

¹ Salman Al Farisi and Muhammad Iqbal Fasa, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84.

² Bambang Hengky Rainanto, "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scaling Up) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 7, no. 1 (2019): 201–10.

dikarenakan prosesnya yang rumit dan panjang³.

2. Kemasan dan Label

Banyak kemasan dan label produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Pemberian label dan isi label merupakan salah satunya. Label produk harus berisikan nama pangan olahan, berat bersih atau isi bersih, daftar bahan yang digunakan, nomor pendaftaran pangan, keterangan kedaluwarsa, kode produksi, keterangan kandungan gizi, logo halal, petunjuk penyimpanan, dan peringatan.⁴

Terdapat beberapa pelaku UMKM yang menjual produk tanpa label produk. Diketahui bahwa label atau nama produk sangat penting dalam menyatakan bahwa produk tersebut diterima oleh masyarakat dan agar tidak ditiru oleh orang lain.⁵



Gambar 2. Contoh Label Tidak Memenuhi Standar

3. Pemasaran Produk

Produk yang diproduksi oleh pedagang belum memiliki kemasan dan label atau izin yang sesuai dengan UU Dagang. Hal ini dapat mempersulit pemasaran produk. Pemasaran produk harus memenuhi persyaratan pemasaran. Salah satunya adalah legalitas usaha/bisnis, produk dapat dipasarkan secara offline ke toko dan minimarket. Produk dapat dijual secara online melalui media sosial.⁶ Memasarkan produk secara online membutuhkan keterampilan fotografi dan vidiografi untuk membuat iklan dan selebaran produk guna menarik minat dari pelanggan.⁷

³ Setiadi Cahyono Putro et al., "PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMPERSIAPKAN INDUSTRI 4.0 DI ERA COVID-19 PADA UMKM GRASIMA," *Jurnal Graha Pengabdian* 5, no. 1 (February 21, 2023): 27–34, <https://doi.org/10.17977/um078v5i12023p27-34>.

⁴ Hayatun Toyyibah, "PERAN BALAI STANDARD ISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PEKANBARU DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁵ Shellen Dhea Af Gaumi and Rudy Hartono, "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 75–90.

⁶ Zaenal Aripin, *Marketing Management* (Deepublish, 2021).

⁷ Achmad Yasrif Haqiqi, "LKP: Perancangan Video Orn Indonesia Guna Menumbuhkan Brand Awareness" (PhD Thesis, Universitas Dinamika, 2021).

METODE

Berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur dengan mitra, solusi yang disusun dengan membuat kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana sosialisasi yang melibatkan pengurus izin usaha, pembuatan kemasan dan label yang menarik, serta pemasaran produk pelaku usaha di Desa Mulyoagung.
2. Pelatihan dan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Badan Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melalui website *online* (oss.go.id).
3. Pelatihan dan pendampingan pengisian formulir pendaftaran nomor (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kota Malang secara luring agar mudah dipahami. Sedangkan, untuk pendaftaran nomor SPP-IRT secara *online* dapat dilakukan dengan mengisi *Google form* dan dilanjutkan dengan pendaftaran melalui website sppirt.pom.go.id.
4. Pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek produk melalui website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI (merek.dgip.go.id)
5. Pelatihan dan pendampingan pengisian formulir sertifikasi jaminan halal produk secara *offline* ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pelaku usaha juga dapat mengajukan sertifikasi jaminan halal suatu produk secara online melalui website Badan Penjaminan Produk Halal Kementerian Agama RI (sehati.halal.go.id).
6. Melakukan pelatihan dan membantu pelaku usaha mikro kecil menengah di Desa Mulyoagung dalam memproduksi foto produk, video, dan brosur untuk pemasaran *online*.

HASIL

Membentuk program pelatihan dan pendampingan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan legitimasi perizinan produk, kemasan, dan label, serta melakukan pemasaran produk bagi para pelaku UMKM di Desa Mulyoagung yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh mitra. Tim pengabdian melakukan observasi ke lokasi pengabdian dan melakukan proses wawancara dengan koordinator BUMDES yang diwakili oleh Ketua Komunitas UMKM Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.



Gambar 3. Kegiatan Observasi dan Wawancara di Desa Sawojajar

2. Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan dan konsultasi berbasis informatika

Untuk meningkatkan legalitas perizinan, pengemasan, pelabelan, dan pemasaran produk secara online dan offline dengan menggunakan bantuan teknologi, serta menetapkan cara atau teknologi informasi yang akan dibutuhkan pada saat dilakukan kegiatan sosialisasi serta workshop legalitas produk oleh pihak pelaku usaha.



Gambar 4. Pelaksanaan Pendaftaran Oleh Pelaku UMKM dibantu dengan Tim Pengabdian

- Prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website oss.go.id
- Pengisian formulir pendaftaran berbasis Google formulir dan dilanjutkan pendaftaran melalui website spirt.pom.go.id secara online.
- Pendampingan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi merupakan sertifikat yang penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk menguatkan dan menambah rasa kepercayaan orang kepada produk yang dihasilkan. Kebersihan dan sanitasi adalah syarat utama untuk mendapatkan jasa boga, jaminan ini diatur langsung oleh Dinas Kesehatan melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).⁸
- Prosedur pendaftaran sertifikasi jaminan halal produk melalui website sehati.halal.go.id

⁸ RUSLAN LA ANE et al., "PENDAMPINGAN PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI PANGAN PADA KANTIN INSTITUSI PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE," *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 100–106.



Gambar 5. Hasil Desain Label dan Logo Produk

- Pelatihan dan pendampingan pembuatan kemasan dan label untuk meningkatkan kualitas produk dan menarik minat konsumen.
- Melatih dan membantu produksi foto produk, video, dan brosur sebagai bagian dari upaya pemasaran online.

DISKUSI

Usaha tersebut tidak berkembang secara optimal karena terdapat faktor-faktor penunjang usaha terutama dalam hal perizinan dan pemasaran yang belum dipahami oleh pelaku usaha. Produk yang telah diproduksi tidak memiliki legalitas komersial, baik Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Merek/Logo, maupun Sertifikat Jaminan Halal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh tim pengabdian, para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengajukan legalitas perjanjian dikarenakan prosesnya yang rumit dan panjang. Banyak kemasan dan label produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Pemberian label dan isi label merupakan salah satunya. Label produk harus berisikan nama pangan olahan, berat bersih atau isi bersih, daftar bahan yang digunakan, nomor pendaftaran pangan, keterangan kedaluwarsa, kode produksi, keterangan kandungan gizi, logo halal, petunjuk penyimpanan, dan peringatan. Produk yang diproduksi oleh pedagang belum memiliki kemasan dan label atau izin yang sesuai dengan UU Dagang. Salah satunya adalah legalitas usaha/bisnis, produk dapat dipasarkan secara offline ke toko dan minimarket.

KESIMPULAN

Legalitas barang dan jasa adalah aspek penting dari sistem hukum, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT), dan sertifikat jaminan halal produk. Ini memastikan bahwa barang tidak disalahgunakan selama produksi.

Masalah utama adalah kurangnya label dan label produk yang jelas yang dapat diandalkan dan tidak melanggar standar yang ditetapkan oleh negara. Kemajuan teknologi juga tidak mudah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan produk.

Solusi untuk masalah ini meliputi: (1) menerapkan undang-undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak barang dan jasa, (2) memastikan bahwa produksi barang dan layanan diatur dan diatur, dan (3) menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk lebih mudah diakses baik secara online maupun offline, menggunakan produksi tertulis dan video. Dengan mengatasi

masalah ini, legalitas barang dan jasa dapat ditingkatkan dan dijamin bahwa mereka diproduksi secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian yang beranggotakan mahasiswa dan dosen dari Universitas Negeri Malang telah membantu pelaksanaan selama pengabdian. Terima kasih juga dukungan dan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang. Tidak lupa juga terima kasih kepada desa mitra Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah mengizinkan bekerjasama untuk pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84.
- Aripin, Zaenal. *Marketing Management*. Deepublish, 2021.
- Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono. "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 75–90.
- Haqiqi, Achmad Yasrif. "LKP: Perancangan Video Orn Indonesia Guna Menumbuhkan Brand Awareness." PhD Thesis, Universitas Dinamika, 2021.
- LA ANE, RUSLAN, SYAMSUAR MANYULLEI, MUH FAJARUDDIN NATSIR, WAHYULAN AMBOI, and SITI CHAERANI FATIMAH APDIN. "PENDAMPINGAN PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI PANGAN PADA KANTIN INSTITUSI PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE." *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 100–106.
- Putro, Setiadi Cahyono, Sujito Sujito, Wahyu Sakti Gunawan Irianto, Slamet Wibawanto, Moh Zainul Falah, Abdullah Iskandar Syah, and Herpri Milenia. "PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMPERSIAPKAN INDUSTRI 4.0 DI ERA COVID-19 PADA UMKM GRASIMA." *Jurnal Graha Pengabdian* 5, no. 1 (February 21, 2023): 27–34. <https://doi.org/10.17977/um078v5i12023p27-34>.
- Rainanto, Bambang Hengky. "Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada Umkm Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 7, no. 1 (2019): 201–10.
- Toyyibah, Hayatun. "PERAN BALAI STANDARD ISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PEKANBARU DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.